

**APLIKASI PROGRAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
(SIMPEG)
(Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang)**

Sulistiyani Komalasari, Imam Hanafi, Endah Setyowati

Jurusan Administasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

Email: tyaboenty@ymail.com

***Abstract:** Application of Personnel Management Information System (SIMPEG) Program (Study of Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang). SIMPEG made aims to assist in the management of employee data information which can generate valid data, integrated and cutting-edge. BKD Malang also considers SIMPEG program as a forum for civil servants who want to know the personnel information in one system. When the program is not implemented SIMPEG will bring up the impact that could destabilize the information and if you still use the manual method will mislead the archives at BKD Malang risk of being lost if there is some threat factors, and cause the performance of civil servants in Malang BKD become ineffective and inefficient . The results of research on the SIMPEG program application at BKD Malang showed no inhibiting factors, namely technical and operational issues eg confusion in operationalising the program causing the staff of BKD Malang still do not understand the procedure. There are several contributing factors in the application program is mastery SIMPEG employees to the information technology, vehicle technology, the amount of resources and the security and confidentiality of data.*

***Keywords:** personnel administration, information management, SIMPEG Program*

Abstrak: Aplikasi Program Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang). SIMPEG dibuat bertujuan untuk membantu dalam pengelolaan informasi data kepegawaian yang dapat menghasilkan data yang valid, terintegrasi dan mutakhir. BKD Kota Malang juga menganggap program SIMPEG sebagai suatu wadah bagi PNS yang ingin mengetahui informasi kepegawaian dalam satu sistem. Ketika program SIMPEG ini tidak diterapkan akan memunculkan dampak yang dapat mengganggu kestabilan informasi dan jika masih memakai cara manual akan menyebabkan arsip-arsip di BKD Kota Malang terancam hilang jika terjadi beberapa faktor ancaman, serta menyebabkan kinerja PNS di BKD Kota Malang menjadi tidak efektif dan efisien. Hasil penelitian tentang aplikasi program SIMPEG di BKD Kota Malang menunjukkan ada faktor penghambat yaitu permasalahan teknis operasional misalkan kebingungan dalam mengoperasikan program ini sehingga menyebabkan staf dari BKD Kota Malang masih tidak memahami prosedurnya. Ada beberapa faktor pendukung dalam aplikasi program SIMPEG tersebut yaitu penguasaan pegawai terhadap teknologi informasi, sarana teknologi, jumlah sumber daya dan keamanan dan kerahasiaan data.

Kata kunci: administrasi kepegawaian, pengelolaan informasi, Program SIMPEG

Pendahuluan

Pada pengelolaan Pegawai Negeri Sipil diperlukan informasi untuk memudahkan dalam menjalankan kinerja Pegawai Negeri Sipil. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berarti dan berguna bagi penerimanya untuk mengambil keputusan masa kini maupun yang akan datang. Di samping itu,

sebuah informasi mempunyai ciri-ciri benar atau salah, baru, tambahan, dan korektif (Ladjamudin, 2005, h.8). Informasi diperoleh melalui proses pengolahan data yang kini telah dapat dijalankan dengan cepat, dimana pada akhirnya mampu menghasilkan suatu informasi yang akurat dan tepat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, informasi yang

berkualitas dapat mendukung suatu keputusan dan proses administrasi organisasi, lembaga, atau instansi tertentu. Selain penggunaan informasi yang berkualitas, kemajuan teknologi juga dibutuhkan dalam pengambilan suatu keputusan oleh beberapa organisasi yang terkait.

Relevansi dari kemajuan teknologi dan informasi saat ini dengan pengelolaan administrasi kepegawaian pada organisasi birokrasi bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mutu manajemen atau pengelolaan administrasi kepegawaian, serta menjawab beberapa tantangan administrasi kepegawaian di Indonesia adalah dengan memakai dan menggunakan manfaat dari kemajuan teknologi dan informasi yang sedang berkembang di Indonesia.

Pemanfaatan teknologi dan informasi dapat menghasilkan tingkat efisiensi dalam berbagai aspek pengelolaan informasi yang ditujukan oleh ketepatan waktu dalam pemrosesan, ketelitian dan kebenaran informasi (validitas) yang dihasilkan (Widiyaningtyas, 2012, h.1).

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang selanjutnya disingkat SIMPEG adalah suatu totalitas yang terpadu terdiri atas perangkat pengolah meliputi pengumpul, prosedur, tenaga pengolah dan perangkat lunak; perangkat penyimpan meliputi pusat data dan bank data serta perangkat komunikasi yang saling berkaitan, ketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi di bidang kepegawaian. SIMPEG berisi data seperti data pokok PNS, data biodata PNS, data gaji, jabatan, pangkat, hubungan keluarga, dan unit kerja.

SIMPEG mulai dikembangkan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemerintah Daerah beberapa tahun terakhir ini. Hal ini juga menjadi sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi dan pemberdayaan aparatur pemerintah baik pusat maupun daerah sesuai manfaatnya. Program tersebut tidak hanya dilaksanakan pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saja, ada beberapa instansi pemerintah daerah yang mulai mengembangkan program SIMPEG tersebut antara lain Badan Kepegawaian Daerah di Indonesia, program SIMPEG tersebut dinilai sangat membantu dalam hal administrasi kepegawaian (pencatatan data, penggolongan, dan penggajian) serta

memiliki kemampuan khusus untuk melakukan simulasi promosi pegawai.

Tinjauan Pustaka

1. Administrasi Kepegawaian

Menurut The Liang Gie Administrasi Kepegawaian adalah segenap aktivitas yang bersangkutan dengan masalah penggunaan tenaga kerja untuk mencapai tujuan tertentu. Masalah pokoknya terutama berkisar pada penerimaan, pengembangan, pemberian balas jasa dan pemberhentian (dikutip dalam Ali Imron, 2008, h.1).

Ada beberapa fungsi juga yang dijabarkan oleh Ali Imron (2008) yang dibedakan menjadi fungsi teknis dan fungsi umum pada administrasi kepegawaian sebagai berikut.

1) Fungsi teknis

Administrasi kepegawaian pada hakikatnya melakukan dua fungsi yaitu fungsi manajerial, dan fungsi operatif (teknis). Fungsi manajerial berkaitan dengan pekerjaan pikiran atau menggunakan pikiran (mental) meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pegawai. Sedangkan fungsi operatif (teknis), berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan fisik, meliputi pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemensiunan pegawai (Ali Imron, 2008, h.4).

2) Fungsi Umum

a) Perencanaan Pegawai

Perencanaan pegawai dapat didefinisikan sebagai proses penentuan kebutuhan pegawai pada masa yang akan datang berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi dan persediaan tenaga kerja yang ada.

b) Pengorganisasian Kepegawaian

pengorganisasian adalah suatu langkah untuk menetapkan, menggolong-golongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan yang dipandang perlu, penetapan tugas dan wewenang seseorang, pendelegasian wewenang dalam rangka untuk mencapai tujuan.

c) Pengarahan Pegawai

Ada banyak teori dan keyakinan tentang apa yang memotivasi pegawai. secara keseluruhan tidak ada kesepakatan tentang motivasi. Oleh karena itu, sangat sulit bagi organisasi untuk sampai pada kebijakan dan pendekatan yang akan memuaskan untuk semua pegawai.

d) Pengendalian Pegawai

Pengawasan sebagai bagian dari pengendalian merupakan proses pengukuran dan penilaian tingkat efektivitas kerja pegawai dan tingkat efisiensi penggunaan sarana kerja dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi.

2. Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan (UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN pasal 1 poin 3).

3. Sistem Informasi Manajemen

Menurut Tata (2005, h.90) Pada dasarnya orang dapat membahas sistem informasi manajemen tanpa komputer, tetapi kemampuan komputer membuat SIM terwujud persoalannya bukan dipakai atau tidaknya komputer dalam sebuah sistem informasi manajemen.

Struktur SIM diuraikan oleh Tata Sutabri (2005, h.97), bahwa terdapat dua cara yaitu dasar kegiatan manajemen dan fungsi organisatoris. Kedua rancangan ditambah konsep struktural kini akan disintesiskan ke dalam suatu struktur SIM. Pada hakekatnya hal ini merupakan suatu kerangka konseptual yang memungkinkan pembahasan dan perencanaan sistem informasi. Adapula suatu struktur fisik yang mendefinisikan cara pelaksanaan SIM. Struktur konseptual suatu SIM merupakan suatu sintesis gagasan yang telah disajikan. SIM didefinisikan sebagai suatu gabungan sub sistem fungsional yang masing-masing dibagi dalam empat seksi pengolahan informasi:

- 1) Pengolahan transaksi;
- 2) Dukungan operasi sistem informasi;
- 3) Dukungan pengendalian manajerial sistem informasi; dan
- 4) Dukungan perencanaan strategis sistem informasi.

Menurut Tata Sutabri (2005, h.99), ada pula dikatakan bahwa SIM berbasis komputer adalah suatu SIM yang menempatkan perkakas pengolah data komputer dalam kedudukan yang penting. Sekarang ini, kalau orang menggambarkan SIM yang modern yang dimaksud adalah SIM yang terkomputerisasi sehingga gagasan-gagasan tentang komputerisasi di dalam organisasi swasta maupun publik sesungguhnya berkenaan dengan tujuan penyempurnaan sistem informasi itu sendiri. Ada beberapa alasan mengapa komputer

merupakan perkakas yang sangat penting di dalam SIM modern.

4. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Depdagri dan Pemda menyebutkan bahwa:

“Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian adalah suatu totalitas yang terpadu yang terdiri atas perangkat pengolahan meliputi pengumpulan, prosedur, tenaga pengolah, dan perangkat lunak; perangkat penyimpanan meliputi pusat data dan bank data serta perangkat komunikasi yang saling berkaitan, bergantung, dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi di bidang kepegawaian”.

5. Electronic Government

Menurut Concard yang dikutip Akadun, (2009, h.131) *electronic government* adalah suatu istilah untuk suatu pemerintahan dengan mengadopsi teknologi berbasis internet yang dapat melengkapi dan meningkatkan program dan pelayanannya. Sedangkan menurut Priyanto dalam Akadun, (2009, h.131) pada prinsipnya berbicara tentang *e-government* adalah berbicara tentang sistem informasi pemerintahan berbasis komputer. Pembahasan sistem informasi manajemen, berarti pengaplikasian sistem informasi dimanapun maka jantungnya adalah teknologi komunikasi dan teknologi informasi. Menurut Wyld dalam Akadun (2009, h.131) *e-government* merupakan pemrosesan secara elektronik yang digunakan pemerintah untuk mengkomunikasikan, menyebarkan atau mengumpulkan informasi sebagai fasilitas transaksi dan perizinan untuk suatu tujuan.

6. Program

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah program di definisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta dengan usaha-usaha dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya. Menurut Jones (dalam Arif Rohman, 2009, h.101) menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Sedangkan menurut Kunarjo dalam perencanaan pembangunan dan pengendalian program pembangunan dijelaskan bahwa program merupakan perangkat dari kegiatan-kegiatan yang diorganisasikan untuk tujuan pencapaian sasaran yang khusus. Oleh karena itu, secara

umum pengertian program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Selain itu, program diartikan sebagai suatu urutan perintah yang diberikan pada suatu komputer untuk membuat sebuah fungsi dan tugas tertentu. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa aspek dalam suatu program, disebutkan bahwa setiap program dijelaskan mengenai:

- a. Tujuan kegiatan yang akan dicapai;
- b. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan;
- c. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui;
- d. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan; dan
- e. Strategi pelaksanaan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai didalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode Menurut Nazir (2009, h.54) menjelaskan bahwa metode jenis deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Fokus dalam penelitian ini adalah: (1) Aplikasi Program Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang meliputi: a.tujuan kegiatan yang akan dicapai, b.kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan, c.proses yang harus dilalui, d.anggaran yang dibutuhkan pada Aplikasi Program Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), (2) faktor penghambat dan faktor pendukung dalam Aplikasi Program Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).

Lokasi penelitian di Kota Malang dan situs penelitian pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Instrumen penelitian ada peneliti sendiri, buku catatan lapangan dan pedoman wawancara. Uji keabsahan data terdiri dari perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan dan triangulasi. Analisis data menggunakan Model Interaktif menurut Miles dan Huberman (1992, h.20). Analisis model interaktif ini melalui 3 tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

1. Aplikasi Program Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang

a. Tujuan kegiatan yang akan dicapai pada Aplikasi Program Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

Pada era perkembangan teknologi seperti sekarang ini, hampir disetiap kehidupan manusia tidak lepas dari teknologi dalam hal khususnya penggunaan teknologi komputer dan informasi. Komputer yang awalnya hanya digunakan untuk hal-hal tertentu saja seperti hitung-hitungan ilmiah dan sebagai sarana dari menyelesaikan suatu pekerjaan (*Microsoft word, excel, dan powerpoint*).

Tujuan yang ingin dicapai dalam aplikasi program SIMPEG ini seperti yang dijelaskan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dan Pemerintahan Daerah yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk mendukung Sistem Manajemen PNS yang rasional dan pengembangan SDM di aparat pemerintah.
- 2) Mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir dan terintegrasi.
- 3) Menyediakan Informasi PNS yang akurat untuk keperluan perencanaan, pengembangan, kesejahteraan, dan pengendalian PNS.
- 4) Membantu kelancaran pekerjaan di bidang kepegawaian, terutama pembuatan laporan.

Tujuan program SIMPEG itu juga ingin dicapai oleh BKD Kota Malang dalam pengaplikasiannya, agar dapat tercipta administrasi kepegawaian yang terkelola dengan baik dan tertata rapi dengan memasukkan data dalam satu sistem yaitu sistem informasi manajemen kepegawaian.

SIMPEG pada dasarnya merupakan suatu sistem informasi manajemen kepegawaian yang diperlukan oleh instansi pemerintahan untuk meningkatkan keterbukaan informasi, mempermudah pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dan digunakan sebagai analisis dan formulasi kebijakan serta implementasinya di bidang sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil melalui sistem komputerisasi *database* kepegawaian. SIMPEG yang secara umum dipahami sebagai sistem informasi manajemen kepegawaian yang meliputi baik perangkat keras, perangkat lunak, piranti jejaring komputer, dan prosedur operasinya yang tentu erat kaitannya dengan regulasi atau kebijakan pemerintah. SIMPEG merupakan sebuah sistem yaitu suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel-variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu (Kumoro, 2004, h.8).

b. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan Aplikasi Program Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

Sosialisasi tersebut berfungsi sebagai sarana untuk memberikan pelatihan, pengetahuan, dan tata cara dalam melaksanakan urusan pengelolaan data kepegawaian berbasis teknologi. Sosialisasi tersebut penting guna mewujudkan suatu aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang terintegrasi mampu menghasilkan informasi yang bermutu dan berkualitas sehingga berdampak pada efektivitas organisasi agar dalam pengelolaan *database* kepegawaian tersebut menjadi efisien, efektif dan memiliki keterbukaan informasi yang tinggi.

Sosialisasi yang dilakukan oleh BKD Kota Malang tidak hanya dengan cara menyampaikan informasi penggunaan program SIMPEG, akan tetapi juga memberikan beberapa modul yang berkaitan dengan penggunaan program SIMPEG tersebut. Sosialisasi ini juga berkaitan dengan tahapan dari perkembangan *e-government* sebagai wujud adanya program SIMPEG ini, pada tahap persiapan bahwa sosialisasi menjadi bagian penting dalam hal pengenalan suatu program yang baru dibuat/diciptakan, sosialisasi tersebut dapat dilaksanakan baik untuk internal maupun eksternal, meskipun sosialisasi SIMPEG ini masih dalam lingkup BKD Kota Malang saja yang dapat mengetahui. Akan tetapi sosialisasi ini dapat dilaksanakan juga pada instansi lainnya.

c. Proses yang harus dilalui Aplikasi Program Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

Ada beberapa proses yang juga dilaksanakan oleh BKD Kota Malang dalam aplikasi program SIMPEG antara lain pengumpulan data, pengolahan data, peremajaan data, dan keluaran (hasil), penjelasan tersebut sebagai berikut.

1) Pengumpulan Data (*Input*)

Aktivitas input meliputi menangkap dan menyiapkan data mengenai kejadian atau transaksi untuk diproses agar menghasilkan sebuah informasi (Effendi dan Rofiq, 2006, h.22-23).

2) Pengolahan Data (*Process*)

Kegiatan pengolahan data (*process*) merupakan bagian perekaman data (Effendi dan Rofiq, 2006, h.22-23). Pengolahan data seluruh pegawai lingkungan Kota Malang ini dilakukan setelah pengumpulan data seluruh

pegawai sudah valid. Kegiatan pengolahan data dilakukan oleh operator utama SIMPEG. Hal ini dikarenakan hanya operator yang memiliki wewenang untuk mengelola seluruh fitur dan data pada *database* kepegawaian.

3) Peremajaan data (*up-date*)

Proses peremajaan (*up-date*) data merupakan kegiatan pemutakhiran data, yang berupa penambahan data baru atau pembaharuan data-data pegawai ke dalam *database*. Proses peremajaan data dilakukan minimal enam bulan sekali atau dua kali dalam setahun sesuai dengan adanya periode kenaikan pangkat pegawai serta dapat dilakukan secara situasional.

4) Keluaran/Hasil (*Output*)

Keluaran dari sistem informasi kepegawaian merupakan sebuah informasi yang harus lengkap, akurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya oleh pihak pengguna (*user*).

d. Anggaran yang dibutuhkan pada Aplikasi Program Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

Pada praktik aplikasi program SIMPEG di BKD Kota Malang, anggaran didapatkan dari sumber dana APBD yang mana anggaran tersebut digunakan untuk sarana dan prasarana yang digunakan untuk tahap persiapan seperti mengadakan pembelian sarana teknologi yaitu perangkat komputer dan komponen-komponen untuk membangun jaringan internet di BKD Kota Malang.

Anggaran harus digunakan sebaik-baiknya agar dapat mencapai tujuan yang efektif, efisien dan profesional. Tujuan tersebut dapat mendukung keberhasilan dari program SIMPEG yang diaplikasikan di BKD Kota Malang ini.

2. Faktor penghambat dan faktor pendukung dalam Aplikasi Program Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

a. Faktor Penghambat

Permasalahan operasional yang terjadi pada umumnya adalah kemampuan sumber daya manusia, sumber daya manusia yang disediakan dan mampu menyelenggarakan program SIMPEG tersebut tidak banyak, hingga dapat menimbulkan keterlambatan dalam pengumpulan data hingga mengeluarkan hasil data. Meskipun program SIMPEG menggunakan teknologi sebagai medianya, akan tetapi sumber daya manusia yang mengoperasionalkannya harus memahami mekanisme pelaksanaan dari program SIMPEG ini.

Permasalahan teknis operasional yang terjadi pada program SIMPEG di BKD Kota Malang menjadi satu pekerjaan rumah bagi pihak yang bertanggung jawab dengan pengoperasian program SIMPEG ini untuk memperbaiki permasalahan operasional yang terjadi, karena program SIMPEG tersebut akan tidak berkembang dengan baik jika masalah tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cepat. Pada penelitian di BKD Kota Malang, tidak hanya permasalahan sumber daya manusia sebagai media pelaksana, akan tetapi juga permasalahan pada sarana dan prasarana pendukung program SIMPEG. Penggunaan *hardware* yang berkualitas rendah dan diisi oleh data-data yang berat akan menyebabkan kerusakan pada *server*.

b. Faktor Pendukung

Ada beberapa faktor pendukung yang sudah dijelaskan pada poin penyajian data yaitu penguasaan pegawai negeri sipil terhadap teknologi informasi, sarana teknologi, jumlah sumber daya manusia, serta keamanan dan kerahasiaan data.

Faktor pendukung yang pertama adalah penguasaan pegawai negeri sipil terhadap teknologi informasi. Teknologi informasi sudah menjadi pilihan utama dalam menciptakan sistem informasi pada perusahaan, maupun instansi pemerintahan sehingga mampu melahirkan keunggulan kompetitif dan menjadi strategi unggulan ditengah era globalisasi informasi persaingan yang semakin ketat (Ardika, Rian *et al*, 2012, h.1).

Faktor pendukung yang kedua adalah sarana teknologi, sarana teknologi adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan oleh suatu pelayanan publik maupun organisasi yang sedang melaksanakan sebuah program, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

Faktor pendukung yang ketiga adalah jumlah sumber daya manusia, kebutuhan akan sumber daya manusia menjadi faktor penting dan menjadi titik sentral dari fungsi perencanaan sumber daya manusia, kebutuhan tersebut selalu mengikuti ketika adanya program maupun kebijakan yang diciptakan oleh suatu organisasi (Sjafri, 2011, h.81).

Faktor pendukung yang keempat adalah keamanan dan kerahasiaan data. Keamanan data merupakan bentuk perlindungan yang diberikan baik secara manual dengan tujuan menjaga kemungkinan yang dapat membahayakan validitas dan integritas data informasi

kepegawaian. Keamanan data menjadi hal yang mutlak untuk memberikan sebuah jaminan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai pengguna dari program SIMPEG tersebut untuk merahasiakan data tersebut demi kepentingan pribadi. Keamanan data diterapkan atas kontrol *brainware* terhadap kinerja sistem informasi yang dijalankan (Effendi dan Rofiq, 2006, h.22-23).

Kesimpulan

SIMPEG pada dasarnya merupakan suatu sistem informasi manajemen kepegawaian yang diperlukan oleh instansi pemerintahan untuk meningkatkan keterbukaan informasi, mempermudah pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dan digunakan sebagai analisis dan formulasi kebijakan serta implementasinya di bidang sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil melalui sistem komputerisasi *database* kepegawaian.

Aplikasi Program SIMPEG di BKD Kota Malang diselenggarakan sejak tahun 2010 hingga sekarang. Perkembangan yang pesat terjadi pada pelaksanaan di BKD Kota Malang tersebut antara lain perubahan pada sistem jaringan yang digunakan untuk mengoperasikan SIMPEG tersebut dari hanya menggunakan *software/aplikasi* menjadi LAN (*Local Network Area*). program SIMPEG tersebut dapat diakses melalui situs *website* yang telah dibuat oleh BKD Kota Malang untuk lebih memudahkan *user* sebagai pelaku dari pengguna aplikasi SIMPEG untuk mengakses *database* kepegawaian.

Sosialisasi yang dilakukan oleh BKD Kota Malang tidak hanya dengan cara menyampaikan informasi penggunaan program SIMPEG, akan tetapi juga memberikan beberapa modul yang berkaitan dengan penggunaan program SIMPEG tersebut. Sosialisasi ini juga berkaitan dengan tahapan dari perkembangan *e-government* sebagai wujud adanya program SIMPEG ini, pada tahap persiapan bahwa sosialisasi menjadi bagian penting dalam hal pengenalan suatu program yang baru dibuat/diciptakan, sosialisasi tersebut dapat dilaksanakan baik untuk internal maupun eksternal, meskipun sosialisasi SIMPEG ini masih dalam lingkup BKD Kota Malang saja yang dapat mengetahui.

Pada proses yang dilalui pada aplikasi program SIMPEG antara lain pengumpulan data, pengolahan data, peremajaan data dan keluaran (hasil). Proses tersebut harus dilalui agar mendapatkan hasil yang maksimal.

Pada praktik aplikasi program SIMPEG di BKD Kota Malang, anggaran didapatkan dari

sumber dana APBD yang mana anggaran tersebut digunakan untuk sarana dan prasarana yang digunakan untuk tahap persiapan seperti mengadakan pembelian sarana teknologi yaitu perangkat komputer dan komponen-komponen untuk membangun jaringan internet di BKD Kota Malang.

Ada faktor penghambat yang menyebabkan permasalahan yang terjadi pada aplikasi program SIMPEG di BKD Kota Malang yaitu Permasalahan teknis operasional bahwa Permasalahan operasional yang terjadi pada umumnya adalah kemampuan sumber daya manusia, sumber daya manusia yang

disediakan dan mampu menyelenggarakan program SIMPEG tersebut tidak banyak, hingga dapat menimbulkan keterlambatan dalam pengumpulan data hingga mengeluarkan hasil data. Meskipun program SIMPEG menggunakan teknologi sebagai mediana, akan tetapi sumber daya manusia yang mengoperasionalkannya harus memahami mekanisme pelaksanaan dari program SIMPEG ini. Untuk faktor pendukung meliputi: penguasaan pegawai negeri sipil terhadap teknologi informasi, sarana teknologi, jumlah sumber daya manusia, serta keamanan dan kerahasiaan data program SIMPEG.

Daftar Pustaka

- Akandun. (2009) **Teknologi Informasi Administrasi**. Bandung, Alfabeta.
- Ardika, Rian *et al*, September 2012, “**Sistem Informasi Data Pegawai Dengan Menggunakan Metode Rapid Application Development**”, Jurnal Ilmiah Sistem Informasi, Vol.x, No.x, hal. 1-11.
- Arif, Rohman. (2009) **Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan**. Yogyakarta, Laksabana Mediatama.
- Effendi, Usman dan Aunur Rofiq M. (2006) **Sistem dan Teknologi Informasi**. Malang, Fakultas Teknologi Ilmu Pertanian Universitas Brawijaya.
- Imron, Ali.M. (2008) **Administrasi Kepegawaian Negara di Indonesia**. Malang, Agritek Pembangunan Nasional.
- Keputusan Menteri Dalam negeri No.17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah. Jakarta, Kementerian Dalam Negeri.
- Kumoro, et al. (2004) **Sistem Informasi Manajemen Dalam Organisasi-Organisasi Publik**. Yogyakarta, Universitas Gajah Mada.
- Ladjamudin, Al-Bahra. (2005) **Analisis dan Desain Sistem Informasi**. Ed.1. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Mangkuprawira, Sjafri. (2011) **Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik**. Bogor, Ghalia Indonesia.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Hubberman. 1992. **Analisis Data Kualitatif**. Diterjemahkan oleh Tjeep Rohendi Rohidi. Jakarta, UI Press.
- Nazir, Moh. (2009) **Metode Penelitian**. Bogor, Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Aparatur Sipil Negara (c.1) Jakarta, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
- Sutabri, Tata. (2005) **Sistem Informasi Manajemen**, Yogyakarta, Andi offset.
- Widiyaningtyas, Yulia Ari. (2012) **Manajemen data base sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) berbasis komputer**. Malang, FIA universitas brawijaya malang.